

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PEMBERITAHUAN TRANSAKSI AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERKAIT NILAI ASET DAN PENJUALANNYA DIBAWAH JUMLAH TERTENTU

Frido Ramadhan Wicaksono (2210622097), Heru Sugiyono, Muthia Sakti

Ekspansi usaha baik secara nasional maupun internasional memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global melalui peningkatan investasi dan lapangan kerja. Salah satu strategi pengembangan usaha yang sering digunakan adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi, yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antarperusahaan, meningkatkan efisiensi, dan meraih keuntungan maksimal. Namun, kegiatan ini juga berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan monopoli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait Implikasi Yuridis terhadap Transaksi Akuisisi Saham jika Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualannya di bawah Jumlah Tertentu tidak diberitahukan kepada KPPU dan untuk menelaah dan menganalisis terkait Kepastian Hukum Pengaturan Transaksi Akuisisi Saham Jika Nilai Aset Dan/Atau Nilai Penjualannya Dibawah Jumlah Tertentu tidak diberitahukan kepada KPPU. Hasil dari penelitian yang penulis uraikan adalah implikasi yuridis terhadap perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan diwajibkan untuk melakukan notifikasi tertulis kepada KPPU jika nilai aset atau penjualannya melebihi ambang batas tertentu sebagaimana diatur dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019. Penghitungan nilai aset dan penjualan dilakukan secara konsolidasi, mencakup induk, anak perusahaan, serta badan usaha terkait. Namun untuk perusahaan yang nilai transaksi di bawah ambang batas, tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi pasca akuisisi, sehingga tidak menghapus kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meski demikian muncul beberapa potensi terjadinya praktik monopoli pasca terjadinya akuisisi. Selanjutnya, kepastian hukum terkait kewajiban perusahaan yang melakukan akuisisi dengan nilai aset dan/atau penjualannya dibawah jumlah tertentu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan tidak memiliki kepastian hukum untuk melakukan hal tersebut. Apabila dibandingkan dengan Singapura, Competition Act 2004 yang diawasi CCCS memastikan efisiensi pasar dengan sanksi tegas. Kedua negara berkomitmen pada regulasi persaingan yang adil dan efektif. Dari hasil penelitian, penulis merekomendasikan pemerintah Indonesia melalui KPPU melakukan perbaikan atau

revisi pada sejumlah pasal dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019 untuk memperluas kriteria yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi praktik anti-persaingan, termasuk perusahaan dengan dominasi pasar yang signifikan meskipun nilai aset atau penjualannya tidak mencapai ambang batas, serta menerapkan sistem pengawasan yang lebih masif terhadap perusahaan pasca akuisisi.

Kata Kunci: kepastian hukum, transaksi, saham perusahaan, nilai aset.

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF NOTIFICATION OF COMPANY SHARE ACQUISITION TRANSACTIONS RELATED TO THE VALUE OF ASSETS AND SALES BELOW A CERTAIN AMOUNT

Frido Ramadhan Wicaksono (2210622097), Heru Sugiyono, Muthia Sakti

Business expansion both nationally and internationally contributes significantly to global economic growth through increased investment and employment. One of the business expansion strategies often used is mergers, consolidations, and acquisitions, which aim to create synergies between companies, increase efficiency, and achieve maximum profits. However, these activities also have the potential to create unfair business competition and monopoly, as regulated in Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, as well as Government Regulation Number 57 Year 2010. The research method that the author uses is a normative juridical approach, so the research approach used in this research is the Legislation approach (statue approach), Case approach (case approach) and Comparative Approach (Comparative Approach). The purpose of this study is to analyze the juridical implications of Share Acquisition Transactions if the Asset Value and/or Sales Value below a Certain Amount is not notified to KPPU and to examine and analyze the Legal Certainty of Regulating Share Acquisition Transactions if the Asset Value and/or Sales Value below a Certain Amount is not notified to KPPU. The results of the research that the author describes are the juridical implications for companies conducting mergers, consolidations, or acquisitions are required to make written notifications to KPPU if the value of assets or sales exceeds a certain threshold as stipulated in PerKPPU Number 3 of 2019. The calculation of the value of assets and sales is carried out on a consolidated basis, including the parent, subsidiaries, and related business entities. However, for companies whose transaction value is below the threshold, they are not required to make post-acquisition notifications, thus not removing the possibility of violating the provisions of Article 28 of Law Number 5 Year 1999. However, there is some potential for monopolistic practices to occur after the acquisition. Furthermore, legal certainty related to the obligations of companies that make acquisitions with an asset value and/or sales below a certain amount has not been regulated in the laws and regulations, so companies do not have legal certainty to do so. When compared to Singapore, the Competition Act 2004 overseen by the CCCS ensures market efficiency with strict sanctions. Both countries are committed to fair and effective competition regulation. From the research results, the author recommends that the Indonesian government through KPPU make improvements or revisions to a number of articles in PerKPPU Number 3 of 2019 to expand more comprehensive criteria in identifying anti-competitive practices, including companies with significant market dominance even though the value of their assets or sales does not reach the

threshold, as well as implementing a more massive supervision system for post-acquisition companies.

Keywords: *legal certainty, transactions, company shares, asset value.*